

BAB III

PEMERINTAH NAGARI KURAI, KECAMATAN SULIKI, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1 Profil Nagari Kurai Kecamatan Suliki

3.1.1 Sejarah Nagari Kurai

Nagari Kurai adalah salah satu wilayah pemerintahan yang berada di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan Nagari Kurai tidak hanya dapat dilihat sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kehidupan sosial dan adat yang berkembang dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakatnya, nilai-nilai adat Minangkabau masih menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat (Pemerintah Nagari Kurai Suliki, 2022).

Sejarah terbentuknya Nagari Kurai berawal dari perjalanan masyarakat yang penduduk aslinya berasal dari wilayah Kamang, Kabupaten Agam. Berdasarkan *warih nan bajawek* yang diwariskan secara turun-temurun, pada awalnya dibawa oleh empat orang kepala kaum yang bergelar Dt. Momat, Dt. Malako, Dt. Jambek, dan Dt. Marajo Pobo. Perpindahan masyarakat tersebut dilakukan karena semakin bertambahnya anggota kaum sehingga kebutuhan terhadap tempat tinggal dan lahan untuk sawah serta ladang juga meningkat. Perjalanan tersebut kemudian membawa kelompok masyarakat menuju beberapa wilayah hingga akhirnya berkembang menjadi kawasan permukiman (Pemerintah Nagari Kurai Suliki, 2022).

Dalam proses pembentukan permukiman, masyarakat membuka lahan untuk tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa kawasan yang berkembang dalam perjalanan tersebut kemudian dikenal dengan nama Koto Baru, Suliki, Roto Tuo, dan Koto Tuo. Pada perkembangan berikutnya, masyarakat menemukan

sebatang kayu besar yang dikenal sebagai kayu Kurai ketika membuka kawasan permukiman baru. Nama kayu tersebut kemudian dijadikan dasar pemberian nama wilayah yang selanjutnya dikenal sebagai Nagari Kurai.

Terbentuknya Nagari Kurai juga tidak terlepas dari tradisi musyawarah masyarakat. Setelah masyarakat membangun tempat tinggal, jalan, tempat mengambil air, balai adat, dan masjid, dilakukan kesepakatan bersama mengenai pembentukan dan penamaan wilayah. Melalui kesepakatan tersebut, nama Kurai kemudian digunakan sebagai nama nagari dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Dengan demikian, Nagari Kurai mempunyai karakteristik wilayah yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi geografis dan kependudukan, tetapi juga memiliki latar belakang sejarah dan kehidupan sosial yang berakar pada tradisi masyarakat Minangkabau. Kondisi tersebut menjadi gambaran awal mengenai lingkungan tempat penelitian ini dilaksanakan.

3.1.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis, Nagari Kurai berada dalam wilayah Kecamatan Suliki. Kecamatan Suliki terletak pada koordinat sekitar $00^{\circ}13'-00^{\circ}25'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}37'-100^{\circ}56'$ Bujur Timur. Nagari Kurai memiliki wilayah yang berbatasan dengan beberapa daerah di sekitarnya. Pada bagian utara berbatasan dengan Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kamang Kabupaten Agam, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Suliki (Pemerintah Nagari Kurai Suliki, 2022).

Wilayah Nagari Kurai memiliki luas sekitar $136,94 \text{ km}^2$. Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Nagari Kurai mencapai 1.672 jiwa. Penduduk tersebut terdiri atas 827 jiwa laki-laki dan 845 jiwa perempuan. Penduduk Nagari Kurai tersebar

pada tiga wilayah jorong yang menjadi bagian dari administrasi nagari yaitu Jorong Kurai, Jorong Botuang, dan Jorong Mudiak Liki. Ketiga jorong ini menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan pemerintahan Nagari Kurai sekaligus menjadi lingkungan tempat masyarakat memperoleh pelayanan pemerintahan dan mengikuti berbagai kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat (Kurai, 2025).

3.1.3 Kondisi Kependudukan Nagari Kurai tahun 2025

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong

No	Nama Jorong	Total		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Botuang	233	252	485
2	Kurai	234	212	446
3	Mudiak Liki	360	381	741
	Jumlah Per Nagari	827	845	1.672

Sumber: Data Penduduk Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, 2025

Berdasarkan tabel 3.1, jumlah penduduk Nagari Kurai tersebar pada tiga jorong, yaitu Jorong Botuang, Jorong Kurai, dan Jorong Mudiak Liki. Jorong Botuang memiliki jumlah penduduk sebanyak 485 jiwa, yang terdiri dari 233 laki-laki dan 252 perempuan. Selanjutnya, Jorong Kurai memiliki jumlah penduduk sebanyak 446 jiwa, terdiri dari 234 laki-laki dan 212 perempuan. Sementara itu, Jorong Mudiak Liki merupakan jorong dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 741 jiwa, yang terdiri dari 360 laki-laki dan 381 perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Nagari Kurai tercatat sebanyak 1.672 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki (Kantor Wali Nagari Kurai, 2025).

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk Nagari Kurai tersebar pada tiga wilayah jorong dengan jumlah penduduk yang berbeda. Kondisi kependudukan ini menjadi salah satu gambaran penting dalam melihat karakteristik masyarakat Nagari Kurai, termasuk dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	47	42	89
2	05-09	56	50	106
3	10-14	83	63	146
4	15-19	71	83	154
5	20-24	68	96	164
6	25-29	57	54	111
7	30-34	61	41	102
8	35-39	43	53	96
9	40-44	56	53	109
10	45-49	62	53	115
11	50-54	57	59	116
12	55-59	38	42	80
13	60-64	38	30	68
14	65-69	41	36	77
15	70-74	27	33	60
16	>75	22	57	79

Sumber: Data Penduduk Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, 2025

Berdasarkan tabel 3.2, penduduk Nagari Kurai terdiri dari kelompok umur yang beragam, mulai dari usia anak-anak hingga lanjut usia. Susunan penduduk berdasarkan kelompok umur memberikan

gambaran mengenai kondisi demografis masyarakat Nagari Kurai serta kebutuhan yang berbeda pada setiap kelompok usia. Kelompok usia anak-anak dan usia produktif memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kelompok penduduk lanjut usia, baik dalam aspek pelayanan pemerintahan maupun pemenuhan kebutuhan sosial.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)	186	155	341
2	Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)	90	126	216
3	Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	551	564	488

Sumber: Data Penduduk Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, 2025

Berdasarkan tabel 3.3, penduduk Nagari Kurai dikelompokkan berdasarkan usia yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Nagari Kurai berada pada kelompok usia produktif. Di samping itu, terdapat pula kelompok penduduk lanjut usia yang memiliki kondisi dan kebutuhan sosial yang berbeda. Keberadaan kelompok masyarakat ini menjadi salah satu hal yang dilihat oleh pemerintah nagari dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam proses pendataan serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	105	91	196
2	Belum Tamat SD/Sederajat	283	264	547
3	Tamat SD/Sederajat	209	193	402
4	SLTP/Sederajat	99	103	202
5	SLTA/Sederajat	110	139	249
6	Diploma I/II	2	5	7
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	7	8	15
8	Diploma IV/Strata I	12	41	53
9	Strata II	-	1	1

Sumber: Data Penduduk Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, 2025

Berdasarkan tabel 3.4, tingkat pendidikan penduduk Nagari Kurai menunjukkan adanya keragaman jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kondisi pendidikan tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang sumber daya manusia yang terdapat di Nagari Kurai. Perbedaan tingkat pendidikan dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi, memahami prosedur pelayanan pemerintahan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari.

3.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nagari Kurai

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Lk	Pr	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	147	122	269
2	Aparatur/Pejabat Negara	6	17	23
3	Tenaga Pengajar	-	3	3
4	Wiraswasta	126	32	158
5	Pertanian/Peternakan	360	48	408
6	Pelajar/Mahasiswa	183	219	402
7	Tenaga Kesehatan	1	1	2
8	Pensiunan	4	2	6
9	Lainnya	-	401	401

Sumber: Data Penduduk Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, 2025

Berdasarkan tabel 3.5, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Nagari Kurai dapat dilihat dari berbagai mata pencaharian yang dijalankan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data di atas perekonomian masyarakat Nagari Kurai secara umum masih bertumpu pada sektor pertanian . Komoditas pertanian utama yang dihasilkan masyarakat antara lain padi, pisang, dan ubi serta tanaman-tanaman lainnya seperti cabe. Disamping itu sebagian kecil masyarakat juga bergerak di sektor wiraswasta, aparatur atau pejabat negara, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, serta pekerjaan lainnya. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang belum atau tidak bekerja dan penduduk yang masih menempuh pendidikan. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai kehidupan ekonomi masyarakat sekaligus acuan dalam melihat keberadaan program bantuan sosial di nagari.

3.1.5 Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa ialah salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah penerima BLT-DD tidak menggambarkan seluruh masyarakat Nagari Kurai, melainkan hanya masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima berdasarkan hasil pendataan dan penetapan pemerintah nagari.

Tabel 3.6

Jumlah Penerima BLT-DD Nagari Kurai Tahun 2024-2026

No	Tahun	Jumlah KPM
1	2024	23
2	2025	1
3	2026	18
Jumlah		42

Sumber: Lampiran Keputusan Wali Nagari Kurai Tahun 2024-2026.

Berdasarkan table 3.6, menunjukkan adanya perubahan jumlah penerima BLT-DD dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut menjadi bagian yang penting untuk dikaji, terutama berkaitan dengan proses pendataan, penetapan, dan perubahan penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Nagari Kurai.

3.2 Pemerintahan Nagari Kurai

Pemerintah Nagari merupakan penyelenggara pemerintahan pada tingkat paling bawah yang dalam sistem pemerintahan Indonesia berkedudukan sebagai bentuk pemerintahan desa, di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan nagari. Penyelenggaraan pemerintahan nagari berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat nagari

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan, dan pemberdayaan (Siagian, A.W., Fajar, H.F., & Alify 2023,137-152).

Pemerintahan Nagari Kurai merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat nagari yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Wali Nagari dibantu oleh perangkat nagari sesuai dengan bidang dan wilayah tugas masing-masing. Struktur tersebut menunjukkan pembagian unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Kurai, mulai dari Wali Nagari, sekretariat, pelaksana teknis, hingga Kepala Jorong. Adapun susunan Pemerintahan Nagari Kurai berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Kurai adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1
Struktur Pemerintahan Nagari Kurai



Selain pemerintah nagari, terdapat Badan Musyawarah (Bamus) Nagari yang menjalankan fungsi permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Bamus berperan sebagai

lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari. Dalam konteks penyaluran BLT-DD, Bamus turut terlibat dalam proses musyawarah nagari, khususnya dalam pembahasan dan penetapan daftar calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Bamus, dalam kehidupan masyarakat Nagari Kurai juga terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki peran dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses pendataan, penetapan, maupun penyaluran BLT-DD, keberadaan lembaga adat tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat nagari, terutama dalam menjaga nilai-nilai adat dan hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Kurai tidak hanya melibatkan unsur pemerintahan, tetapi juga didukung oleh lembaga kemasyarakatan dan adat yang menjadi bagian dari kehidupan nagari.

3.3 Relevansi Penelitian Terhadap Nagari Kurai

Pemilihan Nagari Kurai di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis. Sebagai pemerintahan tingkat paling dasar, nagari menjadi titik temu langsung antara kebijakan negara dengan kehidupan warga. Nagari Kurai secara administratif terbagi ke dalam tiga jorong: Kurai, Botuang, dan Mudiak Liki. Kondisi topografinya berupa perbukitan terjal yang membuat akses fisik masyarakat ke pusat pemerintahan tidak mudah.

Selain kondisi geografis latar belakang sosial ekonomi masyarakat juga menjadi factor penguat. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani lahan basah dengan latar belakang pendidikan yang umumnya menengah ke bawah. Kombinasi antara keterbatasan akses

dan kapasitas tersebut melahirkan kesenjangan informasi hukum antara perangkat nagari dan masyarakat. Karena itulah Nagari Kurai menjadi tempat yang tepat untuk menelaah bagaimana hambatan struktural ini memengaruhi akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) periode 2024–2026.

Dari sisi kultural dan historis, Nagari Kurai memiliki nilai yang kontras dengan praktik yang terjadi di lapangan. Nama "Kurai" sendiri berasal dari penemuan pohon "Kayu Kurai" yang secara filosofis dimaknai sebagai simbol pengayoman, perlindungan, dan semangat gotong royong masyarakat awal (Suliki, 2022). Selain itu, kehidupan sosial di nagari ini masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Peran niniak mamak kuat, dan penyelesaian sengketa merujuk pada filosofi *Lantak nan Salapan*.

Kontradiksi inilah yang menarik untuk diteliti. Sebagaimana sistem pengawasan adat di Nagari Kurai cukup berlapis, namun transparansi dan akuntabilitas publik justru tidak berjalan. Indikasinya adalah Musnag yang eksklusif dan pendataan kemiskinan yang keluar dari kerangka desil kesejahteraan, sehingga menimbulkan bias dalam penyaluran bantuan. Dalam kerangka Hukum Tatanegara dan siyasah dusturiyah, Nagari Kurai merupakan lokus yang strategis untuk menguji konvergensi hukum positif dengan nilai Minangkabau. Prinsip dasar yang melandasi pemerintahan nagari adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yaitu harmonisasi adat dan syariat Islam.

Penelitian ini juga relevan dilakukan di Nagari Kurai karena BLT Dana Desa merupakan program yang menggunakan dana publik dan ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima. Dalam kondisi demikian, pemerintah nagari memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendataan, verifikasi, musyawarah, penetapan, penyaluran, serta

pertanggungjawaban bantuan dapat dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tidak hanya dilihat dari tersalurkannya dana, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjelaskan alasan dan prosedur di balik setiap keputusan yang dibuat.

Dengan demikian, alasan utama Nagari Kurai dipilih sebagai lokasi penelitian adalah adanya fenomena yang dapat dikaji secara langsung mengenai akuntabilitas pemerintah nagari dalam menentukan dan menyalurkan BLT Dana Desa. Adanya perubahan penerima dari tahun ke tahun, perbedaan penjelasan antara masyarakat dan pemerintah nagari, serta temuan mengenai masyarakat dengan desil lebih rendah yang tidak menerima bantuan sementara terdapat masyarakat dengan desil lebih tinggi yang menerima bantuan menjadi dasar penting untuk menelusuri proses penetapan penerima secara lebih mendalam.